

PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN R.A. KARTINI TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN

Ira Pramudawardhani, Eni Estiana
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Veteran Bangun Nusantara
Email: ira_pramudawardhani@yahoo.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjuangan dan pemikiran R.A. Kartini dalam bidang pendidikan bagi kaum wanita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang terdiri dari *heuristik*, kritik ekstern dan intern, interpretasi, historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa R.A. Kartini memandang pendidikan adalah suatu hal sangat penting. Pendidikan akan kuasa mengangkat derajat dan martabat bangsa. Pendidikan yang ia maksudkan juga merupakan pendidikan yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan yang dicita-citakan Kartini ialah pendidikan yang mengedepankan pendidikan budi pekerti dan pembinaan watak, dan dijalankan dengan sistem peraturan yang dibuat Kartini sendiri.

Kata Kunci : Kartini, Pemikiran dan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan juga berkembang secara dinamis. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, aspek pendidikan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu sendiri.

Masuknya pengaruh Islam juga merubah pola dan sistem pendidikan yang sudah lama berjalan di Hindia-Belanda. Pendidikan masa Hindu-Budha yang sangat eksklusif dan ditujukan bagi kalangan bangsawan untuk melegitimasi kekuasaan Raja, berubah haluan menjadi pendidikan untuk seluruh masyarakat, namun masih mengikuti pola padepokan yang sudah berjalan sejak masa Hindu-Budha yang kemudian berkembang menjadi sistem pesantren.

Sampai dengan masa penjajahan VOC di Hindia-Belanda, pendidikan masih dengan pola atau tujuan penyebaran agama. Misi penyebaran agama menjadi prioritas dalam pelaksanaan pendidikan saat itu. Pola pendidikan mulai berubah ketika memasuki awal abad ke-20. Pada masa ini pendidikan mulai memiliki tujuan lain. Pemerintah kolonial Belanda yang mulai mengembangkan

industrialisasi banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain (Soemanto dan Soeyarno, 1983:38 dikutip dari M. Rifa'i, 2011:59).

Permulaan abad ke-20 merupakan sebuah masa dimana kesadaran kebangsaan (nasionalisme) mulai bangkit, masa ini dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan. Bibit-bibit kesadaran nasional tersebut bermula dari sebuah kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan politik Ethis.

Politik Ethis berakar baik pada masalah kemanusiaan maupun pada keuntungan ekonomi. Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880-1897, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul 'Een eereschuld' (suatu hutang kehormatan) di dalam majalah berkala Belanda *de Gids*. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Hutang itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan Kolonial (M.C. Ricklefs, 2017:228).

Dalam politik Ethis, pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar kebijakan baru tersebut : *educatie, emigratie, irrigatie* (pendidikan, perpindahan penduduk, pengairan). Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan utamanya dalam bidang pendidikan, pada akhirnya akan melahirkan elite-elite bangsa sekaligus pinoir kesadaran kebangsaan. Elite-elite tersebut kemudian menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah sarana mencapai kemerdekaan bangsa. Kalangan priyayi Jawa yang "baru" atau yang "lebih rendah", pejabat-pejabat yang maju dan memandang pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan, adalah kelompok pertama yang membentuk suatu organisasi yang benar-benar modern (M.C. Ricklefs, 2017:248).

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan politik Ethis terutama dalam bidang pendidikan menuai banyak dukungan dari pendukung program politik Ethis. Bidang pendidikan diharapkan mampu melahirkan kalangan terpelajar yang

dengan ilmunya, mampu mensejahterakan rakyat. Akan tetapi terdapat dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa. Snouck Hurgronje dan direktur pendidikan Ethis yang pertama (1900-1905), J.H. Abendanon, mendukung pendekatan yang sifatnya elite (M.C. Ricklefs, 2017:236).

Meskipun terjadi beberapa kali perubahan arah kebijakan politik pendidikannya, watak kolonialisme tetap tidak bisa diubah. Hal itu menjadikan unsur diskriminatif dalam kebijakan pendidikan kolonial tak bisa dielakkan. Bagaimana kolonial Belanda, keadaan sosial sengaja dipelihara agar terbagi dalam golongan-golongan atau masyarakat yang hidup terkotak-kotak. Fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah Kolonial sangat terbatas. Kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya mengatur bahwa hanya kalangan elite, khususnya kaum laki-laki yang dapat mengenyam pendidikan, hal ini tentu menimbulkan kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang terdiri dari *heuristik*, kritik ekstern dan intern, verifikasi, historiografi metode sejarah terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1969).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran R.A. Kartini Tentang Pendidikan Perempuan

Titik balik yang menarik dari kehidupan Kartini adalah pendidikan yang didapatkannya, sebuah titik dimana ia akan memainkan kecerdasannya untuk kemajuan bangsanya. Ayah Kartini, R.M.A.A. Sosroningrat mewarisi sifat progresif dari ayahnya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV dari Demak, dan selalu ingat pada pesannya kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal; bahwa "tanpa pengetahuan kalian kelak tidak akan merasa bahagia dan dinasti kita akan makin mundur" (Sitisoemandari Soeroto, 1977:42). Pendidikan sudah menjadi hal yang mengakar kuat dalam keluarga Kartini. Sang Kakek, Tjondronegoro IV adalah sosok yang amat dikagumi Kartini, namanya beberapa kali disebutkan dalam

surat-surat yang ia kirimkan pada sahabat-sahabat penaya. Tjondronegoro IV adalah seorang yang menaruh perhatian dengan dunia pendidikan, ia juga telah mendobrak adat kebiasaan lama yang kolot dengan memberikan pendidikan Barat kepada putera-puterinya.

Berbaaur dalam lingkungan yang penuh orang-orang Belanda tentu tidak selalu mudah, pola pikir kolonial yang masih dianut oleh kebanyakan orang Belanda telah menciptakan suatu sikap diskriminatif terhadap kaum Bumiputera. Kartini pun tidak lepas dari tindakan diskriminatif tersebut, pengalaman yang dialaminya sewaktu sekolah begitu membekas namun tak pernah menyurutkan semangatnya untuk bersekolah. Di sekolah, rupa-rupanya di antara guru-gurunya ada juga yang bermental kolonial dan bersikap diskriminatif, yang tidak rela memberikan angka paling baik kepada Kartini (Sitisoemandari Soeroto, 1977:44). Terlepas dari berbagai pengalaman baik maupun buruk yang telah dialaminya, terdapat sebuah pengalaman penting yang menjadi pondasi Kartini dalam rekonstruksi cita-cita besarnya di masa depan. Sebuah kata bernama “emansipasi” yang belum dikenal oleh Kartini kecil namun di dalam dirinya telah tertanam bibit-bibitnya tatkala ia sedang terlibat percakapan dengan Letsy Detmar, anak kepala sekolah yang duduk satu kelas lebih tinggi dari Kartini.

Namun sebesar apapun tekad Kartini untuk terus belajar, semua terhenti ketika ia menginjak usia 12 tahun, usia dimana bagi kalangan ningrat adalah waktu para puteri-puteri mereka menjadi dewasa. Dewasa disini boleh dikatakan adalah suatu paksaan, mereka harus menjadi dewasa melalui aturan adat yang dipegang teguh oleh kalangan bangsawan. Sebuah adat feodal yang wajib hukumnya bagi puteri-puteri ningrat. Bagi kalangan ningrat seorang puteri-puteri mereka ibarat permata yang halus dan tinggi nilainya, tidak boleh begitu saja dilihat atau dipamerkan di muka umum. Pada usia itulah Kartini memasuki masa “pingitan”. Betapa sedih hati Kartini kala itu, memasuki masa pingitan bagaikan memasuki neraka saja. Apabila dulu ia bebas berlarian maupun berpergian kini tidak lagi dapat dirasakannya, dunia Kartini semakin sempit, hal ini berbanding terbalik dengan pikiran Kartini yang semakin membesar, kepalanya yang dipenuhi banyak pertanyaan tentang cita-cita di masa depan tetap tak dapat menembus tebalnya dinding Kabupaten.

Pada usianya yang menginjak 16 tahun, Kartini menjadi “kakak tertua” di keluarga, hal ini dikarenakan sang Kakak Soelastris telah kawin dan diboyong ke kediaman suaminya. Menjadi kakak tertua artinya boleh mengatur adik-adiknya, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kartini untuk mereslisasikan gagasannya yang revolusioner dengan mendobrak adat kebiasaan kuno yang telah dilaksanakan sejak dahulu, yaitu: ia dengan tegas membebaskan semua adik-adiknya sampai yang paling kecil dari segala etiket feodal yang menurut tradisi, wajib mereka berikan kepada dia sebagai kakak tertua. Menurut adat, adik-adiknya harus memeberikan segala kehormatan kepada Kartini sebagai kakak yang tertua, seperti menyembah, berbahasa krama inggil, dsb (Sitisoemandari Soeroto, 1977:79). Kartini rupanya amat mengagumi semboyan dalam Revolusi Perancis: Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan, yang kemudian bukan sekedar ia kagumi namun juga dipraktekkan dalam kehidupan bersama dengan adik-adiknya. Pada akhirnya, Kartini bersama dengan kedua adiknya, Roekmini dan Kardinah, yang juga dikenal sebagai “Tiga Serangkai” bersama menempati kamar yang sama selama ketiganya dalam masa pingitan, hal ini membuat masa pigitan tidak lagi menjemukan dan penuh dengan senda gurau serta tak lupa dengan kegiatan belajar dengan buku-buku yang tersedia.

Tidak selamanya Kartini dan adik-adiknya berada dalam pingitan, atas desakan Residen Sijthoff dan Nyonya Ovink kepada ayahnya agar mereka dapat diberi kebebasan, luluh juga hati Sang Ayah. Kurungan telah dibuka dan ketiga puteri itu kini telah bebas. Begitulah pada usia 16 tahun akhirnya Kartini telah memperoleh kebebasan yang selama ini ia dambakan. Namun bebasnya bukan berarti perjuangannya berhenti, justru di saat-saat inilah perjuangan Kartini yang sesungguhnya dimulai.

Budaya feodal yang berkembang kuat dalam masyarakat pada masa itu telah menarik garis pemisah antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam budaya feodal inilah kebebasan maupun pemikiran perempuan tidak ada artinya. Kaum perempuan tenggelam dalam superioritas laki-laki serta harus tunduk kepadanya. Kedudukan kaum perempuan dalam kehidupan sosial diatur oleh tradisi; hak dan kewajiban kaum perempuan lebih rendah dibandingkan kaum lelaki (Stuers, 2017:43).

Pada masa itu terdapat istilah “*swargo nunut neroko katut*” atau dalam Bahasa Indonesia “*surga turut neraka ikut*”, yang begitu kuat dianut oleh kalangan masyarakat Jawa, kemana laki-laki mengarahkan langkahnya, perempuan harus turut bersamanya tanpa ada hak untuk bertanya maupun menolak. Adat istiadat tidak memperbolehkan perempuan untuk mempunyai keinginan maupun cita-cita, mereka hanya boleh tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ada. Hanya ada satu cita-cita yang boleh dimiliki seorang perempuan yaitu pernikahan, sebuah ikatan yang tidak pula menjamin seorang perempuan akan mendapat kebebasan. Sistem adat feodal inilah yang menguntungkan kaum laki-laki namun berbanding terbalik menjadi sebuah penindasan bagi kaum perempuan. Maka dari itu perempuan-perempuan Indonesia perlu dibolehkan untuk belajar dan memperoleh pendidikan, karena pendidikan akan mengangkat martabat kaum perempuan dan sebagai akibatnya akan merobohkan sendi-sendi adat feodalisme (Sitisoemandari Soeroto, 1977:5).

Pendidikan pada masa kolonial bersifat yang diskriminatif, salah satunya mengatur pengajaran hanya untuk golongan elite, khususnya kaum laki-laki. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain (M. Rifa'i, 2011:59). Kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan kepada anak-anak bagsawan bumiputra serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak akan menjadi kader pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan atau condong ke Belanda dan merupakan kelompok elite yang terpisah dengan masyarakat. Pemerintah kolonial membatasi akses pendidikan, terutama bagi kaum perempuan. Pendidikan perempuan tidak pernah mendapat prioritas pemerintah, terutama oleh karena pengaruh para bupati yang konservatif dan pejabat-pejabat kolonial yang skeptis (M.C. Ricklefs, 2017:237). Cita-cita pendidikan perempuan mulai digaungkan oleh J.H. Abendanon dalam upayanya mendukung pendidikan di Hindia Belanda. Namun Abendanon mengalami kegagalan ketika ingin memperluas cita-cita tersebut terutama bagi kaum wanita Jawa kalangan atas. Cita-cita pendidikan bagi kaum perempuan juga dimiliki oleh R.A. Kartini, putri bupati Jepara, seperti yang telah dipaparkan diatas, memiliki pandangan maju serta berupaya membebaskan kaumnya dari belenggu adat-

istiadat yang mengekang. Sebagai seorang perempuan cerdas yang telah mengenyam pendidikan, ia melihat bahwa perempuan dengan kepandaianya dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, hal ini tertuang dalam suratnya kepada Nona Zehandelaar tanggal 23 Agustus 1900, berikut;

“Berkah itu akan menjadi semakin besar jika anak-anak perempuan juga diberi kesempatan mempelajari salah satu kepandaian yang memungkinkannya menempuh jalan hidupnya sendiri. Tentunya apabila setelah mendapatkan pelajaran tersebut ia segera kembali ke dunianya yang dulu. Anak perempuan yang pikirannya telah dicerdaskan serta pandangannya telah diperluas tidak akan sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. Dia dimasukkan dalam sangkar setelah dia diajari terbang” (R.A. Kartini, 2017:86).

Meskipun demikian adat-istiadat tetaplah adat-istiadat, tidak dapat dengan mudah dirubah apalagi dihilangkan. Kartini sekalipun tidak dapat menghindari adat pingitan, semasa mudanya ia harus merasakan hidup di dalam “penjara” tanpa banyak mengetahui dunia luar. Sebesar dan sekeras apapun niatnya untuk belajar, namun tradisi berkata lain, Kartini tetap harus melakukannya karena hal itu sudah menjadi tradisi turun temurun.

Sekalipun berada dalam pingitan, tekad dan semangat untuk terus belajar tak pernah padam, begitu banyak yang dipikirkannya terutama mengenai perempuan yang dilarang memperoleh pendidikan. Mengapa hanya laki-laki yang boleh sekolah sedangkan perempuan tidak, atau mengapa pendidikan untuk perempuan hanya diberikan untuk kalangan bangsawan, itu pun hanya diberikan pada masa kanak-kanak, sedang ketika mereka sudah berada dalam masa dewasa, pengajaran bagi mereka akan berhenti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membentuk jiwa memberontak Kartini, dia tidak puas dengan keadaannya maupun keadaan yang menimpa kaumnya. Kartini ingin memperoleh pendidikan, bukan hanya untuk dirinya atau saudaranya saja, tetapi untuk semua perempuan Bumiputera.

Kartini berpendapat bahwa pendidikan tidak terbatas pada jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh pendidikan yang setara. Bagi Kartini, pendidikan adalah tentang budi dan jiwa. Pendidikan pertama dimulai dari keluarga, tidaklah mungkin dalam sebuah keluarga mengajarkan pendidikan moral kepada anak-anak mereka apabila sang ibu tidak berpendidikan.

Kartini mengungkapkan hal tersebut dalam suratnya kepada Nyonya Ovink-Soer pada awal tahun 1900, berikut;

“Siapa yang paling banyak berbuat untuk yang terakhir, yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Wanita, ibu. Karena manusia pertama-tama menerima pendidikan dari seorang perempuan. Dari tangan perempuanlah, anak-anak mulai belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Didikan pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan” (R.A. Kartini, 2017:51).

Sudah jelas disini bahwa bagi Kartini, pendidikan bagi perempuan adalah utama sifatnya, pengajaran yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya untuk membentuk generasi yang gemilang di masa depan, tetapi pengajaran yang dimaksudkan disini adalah tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi Kartini, sehingga ia berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita luhurnya tersebut. Dalam suratnya kepada Tuan G.K. Anton tanggal 4 Oktober 1902, ia berbicara mengenai pendidikan bagi anak-anak perempuan, berikut petikan surat tersebut;

“Kami memohon dengan sangat supaya disini diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan. Bukanlah karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan menjadi saningan orang laki-laki, melainkan karena kami yakin akan pengaruh besar yang mungkin datang dari kaum perempuan. Kami hendak menjadikan perempuan menjadi lebih cakap dalam melakukan tugas besar yang diletakkan oleh ibu Alam sendiri ke dalam tangannya agar menjadi ibu yang menjadi pendidik anak-anak mereka” (R.A. Kartini, 2017:339).

Dalam perjuangannya Kartini tidaklah sendiri, banyak pihak yang mendukung cita-citanya. Kita tentunya telah mengenal Tuan dan Nyonya Abendanon, tanpa mereka mungkin kita tak mengenal sosok Kartini beserta gagasan-gagasannya yang melampaui zamannya, mempunyai tujuan yang sama adalah sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak, Abendanon yang berusaha memberikan pendidikan bagi kaum perempuan Bumiputera, bertemu dengan Kartini yang mempunyai cita-cita yang sama tentulah menjadi sebuah takdir yang amat menggembirakan. Begitu juga dengan dukungan yang diberikan oleh sahabat penanya Stella Zehandelaar, walaupun jarak memisahkan mereka begitu jauh namun tetap membuat berbagai dukungan serta dorongan sampai pada Kartini. Namun diantara banyaknya dukungan yang didapat Kartini, dukungan dari Ayah dan suaminya adalah yang terpenting. Sebagaimana diketahui, Ayah Kartini telah

mendobrak kebiasaan lama yang melarang anak perempuan untuk bersekolah, namun dia menyekolahkan puteri-puterinya walaupun pada akhirnya harus terhenti sebab sang Ayah tetap berpegang teguh pada tradisi yang telah turun-temurun dianut dengan masuknya Kartini dalam pingitan. Meskipun demikian, di hari kemudian ketika Kartini mulai menuai banyak dukungan dari rekan-rekan Belandanya, Sang Ayah mulai luluh dan turut mendukung cita-cita puterinya tersebut. Terbukti dengan rencana Kartini yang didukung oleh Abendanon untuk membuka kelas kecil di rumah ayahnya.

Perempuan menurut Kartini, seperti yang telah disebutkan diatas, adalah sosok pengajar pertama dalam keluarga, ibu merupakan sosok yang mengajarkan moral dan kesusilaan bagi anak-anaknya. Apabila sang ibu tak berpendidikan, tentu akan sulit baginya untuk memberi anak-anaknya pengajaran. Oleh sebab itu, Kartini merasa begitu pentingnya pendidikan kepada kaum perempuan. Perempuan yang berpendidikan, kelak akan dapat ikut serta membangun bangsa, memajukan kehidupan rakyat, dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Bagi Kartini, perempuan bukan hanya sekedar seorang ibu, mereka juga adalah pembawa peradaban. Baginya, tidak akan maju sebuah bangsa apabila kaum perempuannya tidak berpendidikan. Perempuan bukanlah sosok yang akan menjadi saingan bagi kaum laki-laki akan tetapi mereka adalah pendukung mereka, mereka bersama-sama dapat membangun sebuah bangsa yang besar. Pendapat Kartini mengenai perempuan dan peradaban ini telah ia sampaikan kepada Nyonya Abendanon dalam suratnya tanggal 21 Januari 1901, berikut;

“...Perempuan sebagai pendukung peradaban! Bukan, bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan saya sendiri juga yakin sungguh-sungguh, bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh besar, yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan : bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu meningkatkan kadar kesusilaan manusia” (R.A. Kartini, 2017:112).

Dari petikan surat diatas, dapat diketahui bahwa perempuan mempunyai potensi besar dalam pengaruhnya terhadap kehidupan. Perempuan dapat membolak-balikkan kehidupan, mereka dapat memajukan kesusilaan manusia, namun di sisi lain juga dapat menjatuhkannya. Dari perempuan akan didapati pengaruh besar, baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk.

Bagi Kartini, pendidikan adalah kunci majunya sebuah peradaban. Oleh sebab itu, pendapatnya mengenai perempuan haruslah mendapat pendidikan telah banyak ia sampaikan kepada sahabat-sahabat penanya melalui surat-suratnya. Kepada Nyonya van Kol, Kartini menyampaikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada kaum perempuan akan menjadikan bangsanya lebih beradab. Karena menurutnya, kaum perempuan yang telah berpendidikan akan mampu ikut serta membangun bangsa berdampingan dengan kaum laki-laki. Begitu pula yang telah Kartini sampaikan kepada Tuan dan Nyonya Anton, menurutnya apabila pekerjaan dalam memajukan peradaban bangsa ikut diserahkan kepada kaum perempuan yang telah berpendidikan, maka semakin cepat kemajuan itu didapatkan.

Pendapat Kartini mengenai perempuan yang mempunyai andil besar dalam memajukan peradaban terbukti bukanlah sekedar angan-angan kecil namun merupakan sebuah cita-cita besar Kartini, sebab pendapat tersebut telah ia sampaikan kepada semua sahabat-sahabat penanya, bukan hanya beberapa diantara mereka. Dapat dilihat bahwa dengan disampaikannya pemikiran Kartini tersebut kepada semua sahabat-sahabat melalui surat-suratnya, hal ini membuktikan bahwa segala pemikiran tersebut telah dipikirkannya secara masak-masak sehingga hal tersebut bukanlah sekedar angin lalu.

Dalam surat-suratnya, Kartini sangat tertarik dengan gerakan-gerakan emansipasi di Eropa. Hal ini turut pula menggerakkan dirinya untuk berjuang demi kesetaraan untuk kaumnya, Kartini merasa sangat prihatin dengan nasib kaumnya yang masih tertindas dan harus selalu tunduk terhadap laki-laki. Baginya, tidak ada kata kemajuan apabila tidak ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus berdampingan dan bersama-sama guna tercapainya kemajuan bangsa.

Pemikiran Kartini tentang emansipasi tersebut telah menunjukkan seberapa maju pemikiran serta seberapa kuat keinginannya untuk mencerdaskan bangsanya, terutama untuk kaum perempuan. Bukan hanya ketika masih remaja, Kartini makin merasakan peranan emansipasi ketika ia telah menikah. Dari pernikahan tersebut, Kartini merasa bahwa usaha untuk mencerdaskan bangsa lebih mudah, hal ini karena dua unsur pembangun bangsa yang kuat, yaitu laki-

laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini Kartini dan suaminya bekerjasama untuk memajukan pendidikan untuk kaum Bumiputera, terutama perempuan.

Suami Kartini, Raden Adipati Djojo Adiningrat, yang merupakan Bupati Rembang adalah sosok progresif dan menyukai kemajuan, meskipun seorang dari kalangan ningrat tetapi sama sekali tidak menghalangi Kartini untuk mewujudkan cita-citanya, maka tak heran jika Kartini mendapat dukungan penuh dari sang suami. Hal menarik dalam hubungan Kartini dan suaminya adalah semenjak awal menikah, Kartini telah menunjukkan sikapnya yang berani dan cenderung radikal pada zamannya. Untuk pernikahannya sendiri, Kartini mengajukan syarat bahwa tidak akan diadakan upacara berlutut dan menyembah kaki mempelai pria. Selain itu ia masih mengajukan satu syarat lagi, yaitu bahwa ia akan berbicara dalam bahasa Jawa “ngoko” dengan suaminya (Sitisoemandari Soeroto, 1977:356). Yang lebih menariknya lagi, sang suami bersedia menerima kedua syarat yang diajukan Kartini tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa semenjak awal, sang suami telah menerima pemikiran Kartini yang berbeda itu dan di kemudian hari mendukung cita-cita Kartini. Dengan begitu, maka beruntunglah Kartini dapat bersuamikan seorang yang mau berjuang bersamanya, padahal sebelumnya, Kartini berkeinginan untuk tidak menikah dan berkeinginan untuk belajar ke Negeri Belanda.

Kartini adalah orang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menutup zaman tengah, zaman feodalisme Pribumi yang “sakitan” menurut istilah Bung Karno. Bersamaan dengan batas sejarah Pribumi ini, mulai berakhir pula penjajahan kuno Belanda atas Indonesia dan memasuki babak sejarah penjajahan baru; imperialisme modern (Toer, 2003:12). Tergapainya cita-cita rakyat Bumiputera untuk memperoleh pendidikan tidak lepas dari peranan Politik Etis. Van Deventer yang berpendapat bahwa Indonesia telah berjasa membantu keuangan pemerintah Belanda. Oleh karena itu sudah sewajarnya kebaikan budi orang Indonesia dibayar kembali. Upaya pemulihan kembali Indonesia melalui trias yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi.

Dalam surat-suratnya, R.A. Kartini meratapi buta huruf di kalangan perempuan karena tidak tersedianya peluang pendidikan bagi mereka. Setelah

Kartini wafat pada tahun 1904, perjuangannya untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan dilanjutkan oleh teman-teman Belandanya. Surat-surat Kartini antara tahun 1899-1904 kepada teman-teman Belandanya disunting secara selektif dan diterbitkan pada 1911 di Belanda dengan judul *Door Duisternis tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Usaha menerbitkan surat-surat Kartini tersebut, menurut Soekesi Soemoatmaja, untuk mencari dana guna mendirikan sekolah-sekolah perempuan di Jawa (Habis Gelap Terbitlah Sekolah. Diakses dari Historia.id pada hari Kamis 28 Juni 2018 pukul 16.02 WIB).

Dari edukasi tersebut muncullah golongan-golongan terpelajar yang berpengaruh dan telah mengubah perlawanan bangsa Indonesia dari perlawanan bersenjata menjadi diplomasi. Mereka melihat bahwa pendidikan adalah alat penting untuk mencapai kemajuan rakyat dan mencapai kemerdekaan. Dalam hal kemajuan rakyat tentu hal ini dalam arti menyeluruh yaitu seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin maupun status sosialnya. Dan seperti yang telah dikemukakan Kartini bahwa kemajuan bangsa dapat dicapai apabila kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sehingga nantinya dapat berkerjasama mewujudkan kemajuan.

Masuknya ekonomi uang dan pendidikan Barat telah memperluas cakrawala orang Indonesia dan mengganggu kestabilan masyarakat tradisional. Eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah telah memperburuk keadaan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Sistem tanam paksa yang berlangsung hingga dikeluarkannya Undang-Undang Agraria telah menimbulkan kekacauan ekonomi yang berujung pada hancurnya sistem ekonomi tradisional. Penghapusan sistem tradisional juga terjadi dalam pemerintahan dengan dihapuskannya fungsi bupati yang berlangsung secara turun-temurun (Stuers, 2017:50).

Perubahan banyak terjadi antara tahun 1904-1914, peraturan kolonial berubah seiring dengan munculnya Politik Etis. Edukasi yang menjadi salah satu pokok dalam politik etis nyatanya telah memberi dampak yang besar, meskipun pada awalnya pemberian pendidikan hanya diberikan kepada golongan priyayi dan secara tidak langsung memberi keuntungan kepada pihak kolonial. Salah satu dampaknya adalah terbukanya jalan bagi pemikiran-pemikiran R.A. Kartini untuk

memberikan pendidikan kepada rakyat Bumiputera, khususnya bagi perempuan. Meski demikian, bukan hanya Kartini, namun di daerah lain terdapat tokoh-tokoh perempuan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan serta berusaha mengangkat derajat kaum perempuan. Dewi Sartika di Bandung pada tahun 1904 mendirikan sekolah yang dikenal sebagai Kautamaan Istri. Dewi Sartika juga banyak berbicara mengenai ketidakadilan pembagian upah buruh antara laki-laki dan perempuan. Dewi Sartika adalah salah satu contoh dari sekian banyak perempuan progresif yang telah melakukan aksinya bahkan jauh sebelum gerakan feminis muncul sebagai sebuah gerakan besar.

Sekolah yang diperuntukkan bagi gadis-gadis pertama diprakarsai dan dibuka oleh Kartini di Jepara pada bulan Juni tahun 1903. Uniknyanya, sekolah yang didirikan Kartini tersebut tidak berdasar pada kurikulum yang ditentukan Pemerintah Hindia Belanda melainkan menurut sistem Kartini sendiri. Kurikulum sekolah yang diinginkan Kartini sangat berbeda dengan kurikulum yang diajarkan pada sekolah-sekolah negeri. Pendidikan bagi Kartini yang lebih penting adalah mengajarkan tentang moral dan budi pekerti. Kartini menulis hal ini dalam suratnya, berikut;

“.....memang dalam “Sekolah kami” kami lebih mementingkan pendidikan budipekerti daripada doktrinal. Oleh sebab itu kami juga tidak menginginkan sekolah itu didirikan oleh Pemerintah, melainkan oleh swasta, karena kami nanti akan harus tunduk pada peraturan-peraturan tertentu. Padahal kami ingin membangun sekolah kami menurut gagasan kami sendiri. Kami ingin mendidik anak-anak tidak secara di sekolah, melainkan seperti seorang ibu mendidik anak-anaknya.

Cara mendidik di situ tidak boleh mengingatkan kepada sekolah, melainkan kepada suatu rumahtangga besar, dimana anggota-anggotanya saling mencintai dan saling mengajar, dan di mana ibu tidak hanya namanya saja, melainkan *sungguh-sungguh ibu* – pendidik jasmani dan rohani anaknya” (Kartini dalam Soeroto, 1977:324).

Sekolah Kartini dimulai dengan satu orang murid, namun seiring berjalannya waktu, murid sekolah ini menjadi 7 orang. Sekolah ini diterima begitu baik oleh masyarakat Jepara. Masyarakat Jepara mulai menaruh perhatian pada program Kartini tersebut, bahkan terdapat pula anak-anak dari luar Jepara yang memasuki sekolah tersebut.

Sekolah itu dibuka empat hari seminggu, dari jam 8 sampai 12.30. Murid-murid diberi pelajaran: membaca, menulis, menggambar, dsb ditambah pekerjaan

tangan dan memasak. Pelajaran itu tidak diberikan menurut sistem di sekolah, melainkan menurut cara mereka sendiri. Sistem inilah yang ditahun-tahun mendatang dipakai di sekolah-sekolah Kartini (Sitisoemandari Soeroto, 1977:325-326) .

Sekalipun berbeda dengan sistem sekolah yang ada di Hindia Belanda saat itu, sekolah ini telah berhasil mendidik anak-anak dengan sistem dan pelajaran yang disusun sendiri. Menilik dari surat-surat yang ia kirim tentang sekolahnya, murid-murid yang bersekolah disana berada dalam usia yang setingkat dengan Sekolah Dasar, ditambah pula dengan pelajaran keterampilan yang diperuntukkan bagi para calon ibu rumahtangga. Contoh praktek sekolah itu kelas (setelah Kartini wafat) memberi inspirasi kepada kaum Etnis Belanda dalam mendirikan Sekolah-Sekolah Kartini dan Sekolah-Sekolah van Deventer di Jawa (Sitisoemandari Soeroto, 1977:327)

SIMPULAN

Pendidikan di Hindia Belanda dibedakan menjadi pendidikan untuk orang-orang kulit putih, pendidikan untuk pribumi, dan pendidikan untuk orang-orang Timur Asing. Pendidikan juga diberikan menurut golongan sosial, orang-orang kalangan atas dan bangsawan menempati sekolah yang berbeda dengan orang-orang kalangan bawah. Selain itu, pendidikan yang diberikan untuk orang-orang kulit putih jauh lebih baik daripada pendidikan yang diberikan kepada penduduk pribumi, hal ini kemudian memunculkan diskriminasi. Pendidikan yang diberikan kepada rakyat Bumiputra sejatinya merupakan salah satu cara pemerintah kolonial untuk mendapatkan tenaga kerja rendah terdidik semata-mata untuk kepentingan pihak kolonial. R.A. Kartini memandang pendidikan adalah suatu hal sangat penting. Pendidikan akan kuasa mengangkat derajat dan martabat bangsa. Pendidikan yang ia maksudkan juga merupakan pendidikan yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan yang dicita-citakan Kartini ialah pendidikan yang mengedepankan pendidikan budi pekerti dan pembinaan watak, dan dijalankan dengan sistem peraturan yang dibuat Kartini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. *Politik Etis, Van Deventer Hingga Douwes Dekker*. Diakses dari Histori.id pada hari Senin, 2 Juli 2018 pukul 18.32 WIB.
- Gottshalck, Louis. 1983. *Understanding History (Mengerti Sejarah, Terj. Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Isnaeni, Hendri. 2013. *Habis Gelap Terbitlah Sekolah*. Diakses dari Historia.id pada hari Kamis 28 Juni 2018 pukul 16.02 WIB.
- Kartini, R.A. 2017. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____.1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rahman, Momon Abdul. 2015. *Jong Java: Peranannya Dalam Persatuan Bangsa*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ricklefs, M.C. 2017. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soeroto, Sitisomandari. 2001. *Kartini: Sebuah Biografi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1986. *Ki Hajar Dewantara Dan Taman Siswa Dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Sutrisno, Sulatin. 2014. *Emansipasi: Surat-Surat Kepada Bangsanya 1899-1904*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Stuers, Cora Vreede. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan & Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.